



RANCANGAN
AKHIR

RENCANA KERJA TAHUN 2026

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan penjabaran dari perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, serta memuat penyesuaian target kinerja dan kegiatan berdasarkan perkembangan situasi, kebutuhan aktual, serta dinamika pelaksanaan program selama tahun berjalan. Penyusunan dokumen ini juga telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2026

Dokumen ini menjadi landasan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, guna mendukung kemandirian fiskal Kota Balikpapan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Masukan, saran, dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan sangat kami harapkan demi penyempurnaan dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2026

Balikpapan, Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah



IDHAM,SE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berkelanjutan, pendapatan asli daerah (PAD) memegang peranan strategis sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah, yang dikelola langsung oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan. Sebagai ujung tombak dalam optimalisasi penerimaan daerah, BPPDRD dituntut untuk menyusun perencanaan kerja yang terukur, adaptif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan.

Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam memastikan keberlanjutan program dan kegiatan BPPDRD yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sekaligus menjadi fase akselerasi terhadap target-target kinerja pendapatan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Selain itu, tantangan eksternal seperti dinamika ekonomi nasional, perubahan regulasi perpajakan, transformasi digital, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik menuntut BPPDRD untuk bertransformasi menjadi organisasi yang lebih profesional, responsif, dan transparan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2026 ini bertujuan untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (outcome-based). Renja ini juga disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026

Dokumen rencana kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berupaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang akan menunjang keberhasilan pembangunan nasional, untuk itu maka perlu disusun rencana pembangunan Badan Pengelola Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang spesifik, tepat tujuan dan sasaran dengan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032.
 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan

Tahun 2021-2026.

21. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPDRD selama tahun anggaran 2026. Dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan yang terukur, terintegrasi, serta sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan, khususnya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.

Renja ini juga merupakan instrumen penting untuk menyinergikan perencanaan pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah, memperkuat akuntabilitas perencanaan anggaran, dan mendorong pencapaian target-target kinerja pendapatan secara lebih efektif dan efisien.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh BPPDRD dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi.
2. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) BPPDRD ke dalam rencana tahunan yang operasional dan implementatif, sesuai dengan tujuan strategis dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran kinerja dengan berbasis pada data dan indikator yang terukur serta berorientasi pada hasil (outcome).
4. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan dan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, inovasi layanan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.
5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian Renstra BPPDRD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
- 3.3 Program dan Kegiatan Usulan 2025

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun yang Lalu dan Capaian RENSTRA BPPDRD

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Tahun 2025 telah dilaksanakan berdasarkan prioritas dan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Secara umum, kinerja pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan arah yang positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang memengaruhi pencapaian sasaran secara optimal yang diuraikan dalam lampiran 1 Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja BPPDRD dan pencapaian Renstra BPPDRD.

Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPDRD Tahun 2023 serta Program dan Kegiatan berdasarkan pencapaian atau realisasi APBD tiap Program dan Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra BPPDRD s/d Tahun 2024

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	83.31		12.26		60.17		0		0		0	15.23		15.23		25.31		15.23		18.28		Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Milyar	5209.09	22,591,368,250	1208	8,327,043,159	1062.03	10,223,112,652	159.10	929,971,139	192.15	865,710,281	251.28	2,326,741,341	282.584	4,489,842,398	885.114	8,612,265,159	83.34	84.24	2093.114	16,939,308,318	40.18	74.98	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	Perse ntase	55.26	22,591,368,250	3	8,327,043,159	11.05	10,223,112,652	2	929,971,139	3.53	865,710,281		2,326,741,341		4,489,842,398	5.53	8,612,265,159	50.05	84.24	8.53	16,939,308,318	15.44	74.98	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1.1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis Pajak Daerah serta pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak Daerah	dokumen					2	386,450,000	1	43,344,000	0	28,136,000	1	13,460,000	0	241,880,500	2	326,820,500	100	84.57					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Laporan					8	2,527,646,442	2	233,122,892	2	151,922,213	2	412,516,359	2	1,274,420,138	8	2,071,981,602	100	81.97					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	Unit					3	759,118,000	1	17,232,754	0	265,376,067	1	356,752,256	1	76,143,869	3	715,504,946	100	94.25					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak darah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan					1	354,896,030	0	0	0	78,420,000	0	133,712,737	1	98,561,000	1	310,693,737	100	87.55					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan	Laporan					1	1,512,847,780	0	308,592,000	0	150,650,215	0	106,083,158	1	380,003,418	1	945,328,791	100	62.49					Badan Pengelola Pajak	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
									I	II	III	IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Data Pajak Daerah	pelaporan basis data Pajak Daerah																								Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1 .1. 6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	objek					1500 0	2,747,775,0 00	233 9	163,243,093	2851	0	722,707,7 31	1,587,292,5 75	5190	2,473,24 3,399	34.6	90.01							Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1 .1. 7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan Pajak Daerah	dokumen					2000 0	249,987,20 0	209 873	105,270,000	3293	0	3326	0	909	104,319,000	21740 1	209,589,000	1087.0 1	83.84					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1 .1. 8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dokumen					1	320,000,00 0	1	14,999,500	0	81,440,477	0	54,618,119	0	144,065,400	1	295,123,496	100	92.23					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1 .1. 9	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	dokumen					1811 3	180,000,00 0	458 5	0	4589	17,491,750	4377	49,570,780	3801	93,701,968	17352	160,764,498	95.8	89.31					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1 .1. 10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan Pajak daerah	Dokumen					550	100,000,00 0	130	10,145,000	141	18,405,375	193	29,103,820	166	35,303,160	630	92,957,355	114.55	92.96					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1 .1. 11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen					2	100,000,00 0	0	1,280,000	1	5,867,500	0	22,084,040	1	63,600,700	2	92,832,240	100	92.83					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1 .1. 12	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Pajak Daerah	dokumen					1	299,999,30 0	0	4,047,500	0	35,557,484	0	43,927,781	1	185,157,396	1	268,690,161	100	89.56					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1 .1. 13	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan					11	228,000,00 0	11	28,694,400	0	32,443,200	11	91,082,104	11	60,790,400	11	213,010,104	100	93.43					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I	II	III	IV																	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																										Daerah;	
1.1 .1. 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan					2	456,392,900	0	0	0	0	1	291,122,456	2	144,602,874	2	435,725,330	100	95.47					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BP2DRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	32		0		29		0		0		0		0		0		0		0		0		Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	86	132,288,652,955	89.53	97,006,978,085	84	53,463,927,600	0	16,851,998,718	0	7,922,636,201	0	1,652,651,034	89.53	17,085,787,150	89.53	43,513,073,103	106.58	81.39	89.53	140,520,051,188	104.1	106.22	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1 .1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Poin)	Poin	353	234,594,000	0	0	71	99,594,000	0	29,193,000	0	0		0		42,696,000	0	71,889,000	0	72.18	0	71,889,000	0	30.64	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1 .1. 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					1	74,670,000	0	29,193,000	0	0	0	0	1	18,712,000	1	47,905,000	100	64.16					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1 .1. 2	Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	Jumla Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					1	24,924,000	1	0	0	0	0	0	1	23,984,000	1	23,984,000	100	96.23					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1 .2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	100	117,302,142,983	82.08	90,869,731,668	87	47,927,604,790	0	16,240,802,759	0	6,615,465,724		854,792,781		15,030,884,674	0	38,741,945,938	0	80.83	82.08	129,611,677,606	82.08	110.49	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1 .2. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					70	47,927,604,790	0	16,240,802,759	70	6,615,465,724	70	854,792,781	70	15,030,884,674	70	38,741,945,938	100	80.83					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	85	1,335,000,000	78.54	80,000,000	83	150,584,000	0	0	0	0	6,686,080	138,797,919	0	145,483,999	0	96.61	78.54	225,483,999	92.4	16.89	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
2.1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang					40	150,584,000	0	0	0	0	6,686,080	40	138,797,919	40	145,483,999	100	96.61					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;		
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	88	5,250,796,560	79.17	3,378,551,622	85	2,593,095,510	0	227,650,258	0	340,059,595	354,175,562	1,344,754,464	0	2,266,639,879	0	87.41	79.17	5,645,191,501	89.97	107.51	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
2.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket					15	814,262,710	0	0	5	101,400,000	5	17,500,000	5	498,700,000	15	617,600,000	100	75.85				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;		
2.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					2	553,911,800	1	16,808,000	0	116,840,100	1	33,850,000	0	320,653,100	2	488,151,200	100	88.13				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;		
2.1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakkan dan penggandaan yang disediakan	Paket					2	475,000,000	0	0	1	111,005,875	0	91,319,500	1	226,197,750	2	428,523,125	100	90.22				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;		
2.1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan					1	99,921,000	0	1,600,000	0	7,360,000	0	59,500,000	1	20,480,000	1	88,940,000	100	89.01				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;		
2.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggraan rapa koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					1	600,000,000	1	209,242,258	0	3,453,620	0	152,006,062	0	233,723,614	1	598,425,554	100	99.74				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;		
2.1.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen					1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	1	45,000,000	1	45,000,000	100	90				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																										Daerah;	
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	88	710,030,552	78,23	103,789,250	86	639,152,290	0	0	0	472,144,949		0		109,940,000	0	582,084,949	0	91.07	78	685,874,199	88.64	96.6	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					6	524,696,000	0	0	6	472,144,949		0		0	6	472,144,949	100	89.98					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit					6	114,456,290	0	0	0	0	0	0	6	109,940,000	6	109,940,000	100	96.05					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	96	3,644,173,660	78.54	1,885,742,793	87	961,189,700	0	143,284,887	0	295,629,623		203,056,923		239,108,544	0	881,079,977	0	91.67	78.54	2,766,822,770	81.81	75.92	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan					3	174,978,200	1	23,730,615	0	61,728,215	1	23,725,515	1	0	3	109,184,345	100	62.4					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan					3	786,211,500	1	119,554,272	0	233,901,408	1	179,331,408	3	239,108,544	3	771,895,632	100	98.18					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	95	2,598,915,200	79.38	689,162,752	87	1,092,707,310	0	211,067,814	0	199,336,310	0	233,939,688		179,605,549	0	823,949,361	0	75.4	79.38	1,513,112,113	83.56	58.22	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit					75	767,867,310	20	124,862,054	20	151,672,990	15	162,716,888	20	138,239,734	75	577,491,666	100	75.21					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.7.	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit					75	324,840,000	10	86,205,760	25	47,663,320	20	71,222,800	15	41,365,815	70	246,457,695	93.33	75.87					Badan Pengelola	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
									I		II		III		IV															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
2	Mesin Lainnya	yang Dipelihara																								Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;				
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					104.13	86.1					38.96	54.51		
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi					Sangat Rendah	Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																					130.84	86.63								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																					Sangat Tinggi	Tinggi								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																					6.26	84.93					44.75	72.94		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																					Sangat Rendah	Tinggi					Sangat Rendah	Sedang		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					94.96	82.82					72.14	90.6		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Tinggi	Tinggi					Sedang	Sangat Tinggi		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Capaian Realisasi Kinerja Instansi BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	(Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	13.40	13,49	101 %	Melebihi Target
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai	71	69,22	97 %	Tidak Tercapai

Sumber : Hasil Pengolahan Data, BPPDRD Tahun 2024

Berdasarkan Capaian Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi BPPDRD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2024, selanjutnya dilakukan analisis capaian realisasi terhadap target IKU tahun 2024, Adapun analisis terdeskripsi sebagai berikut.

a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dari tabel 3.7 diatas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan indikator kinerja Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan predikat Melebihi Target dengan Capaian 101%,

Tabel Perbandingan PAD Tahun 2022, 2023 dan 2024

No.	Uraian	2022	2023	2024	Peningkatan / Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	811,249,650,355.18	892,824,394,215.84	977,586,034,227	84,761,640,011.40	9.49
2	Pajak Daerah	623,584,889,978.40	715,889,547,764.50	809,678,437,973	93,788,890,208.50	13.10
3	Retribusi Daerah	40,110,966,976.50	52,196,511,543.82	62,005,985,055	9,809,473,511.18	18.79
4	Pajak dan Retribusi Daerah	663,695,856,954.90	768,086,059,308.32	871,684,423,028	103,598,363,719.68	13.49

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mendukung kinerja Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah, antara lain:

- a. Digitalisasi pembayaran Pajak Daerah
Dengan digitalisasi atau elektronifikasi pembayaran pajak daerah memudahkan wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak daerah mereka melalui gadget mereka ataupun melalui merchant2 (indomaret, dll) dan ewallet yang mereka miliki seperti Gojek, QRIS, Go pay, Tokopedia, Sehingga memudahkan wajib pajak untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Upaya Penegakan Hukum Pajak Daerah
 - Dalam Hal Adanya Tunggakan Pajak Daerah Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo akan diberikan surat tagihan pajak daerah dan sanksi administrasi
 - Memberikan teguran tertulis berupa surat pemanggilan 1 s.d 3 kepada pengusaha yang tidak/belum mendaftarkan sebagai Wajib Pajak;
 - Memberikan teguran tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar dan belum lapor; dan
 - Melakukan pemasangan stiker terhadap wajib pajak yang tidak melapor dan tidak mendaftarkan
- c. Monitoring Objek Pajak Daerah
Monitoring ini dilakukan secara rutin maupun insidental atau acara yang tidak rutin pada saat event tertentu. Upaya ini dilakukan dengan pengawasan Pajak Daerah, output yang diharapkan yaitu jumlah pelaporan

Pajak yang dilakukan secara Self Assestment (Pelaporan Mandiri) sesuai dengan keadaan di lapangan, terutama Pajak Hiburan

- d. Pemutakhiran Data Pajak Daerah melalui Updating data pajak daerah dan Penyesuaian NJOP PBB-P2

Pemutakhiran ini untuk memisahkan antara Wajib Pajak Daerah yang aktif dan pasif sehingga untuk wajib pajak yang tidak aktif untuk tidak tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun berikutnya, juga dilakukan Updating data, mengingat validitas data merupakan hal yang penting dalam pencapaian ataupun penentuan target pajak daerah. Selain itu, updating data juga dapat berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam membayar pajak. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak pada beberapa wilayah yang belum sesuai antara data yang ada dengan kondisi di lapangan, misalnya luas bangunan objek pajak dan belum terdapat bangunan sebelumnya,

- e. Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan-kebijakan terbaru, terutama terkait kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, dilakukan dengan sosialisasi Langsung dengan Wajib Pajak Daerah atau dengan media Radio, Instagram dan media online lainnya. Dengan tujuan menumbuhkan daya minat wajib pajak dalam menunaikan pajaknya.

2. Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada Tahun 2023 Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperoleh nilai 69.22 atau 94.2% dari target yang ditetapkan dan meningkat pada Tahun 2023 . Indikator ini dapat terlaksana yaitu dengan memperhatikan kebutuhan Internal Kepegawaian baik dari Sarana dan Prasarana maupun kegiatan yang tujuannya mampu meningkatkan kualitas Internal Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, baik dari Perencanaan Anggaran, Gaji dan Tunjangan, kelengkapan komponen administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, Penyedia Jasa Penunjang, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat Internal untuk menjadi Indikator Penilaian dalam Meningkatkan Kualitas Internal Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebutuhan Internal diakomodir melalui Rapat Internal dan evaluasi dilakukan secara berkala per triwulan setiap tahunnya, yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi setiap kebutuhan serta tingkat partisipasi Internal dalam bidang kepegawaian serta

pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan Pengelola Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Perbandingan Realisasi Capaian dan Target Renstra pada Tahun 2021-2025 sebagai berikut :

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				2022	2023	2025	2025	2022	2023	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)				780.71	852.37	1,062.03					
2	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)				5.02	8.04	11.05					
3	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1	1	1					
4	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1	1	1					
5	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan				6	8	8					

	Kebijakan Pajak Daerah											
6	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1	1	1					
7	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1,438	3,851	8,415					
8	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1	1	1					
9	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				9,000	9,000	9,000					
10	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				9,690	9,884	10,082					
11	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				5,280	5,544	5,821					

12	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1	1	1					
13	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				18,112	18,112	18,113					
14	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				500	550	600					
15	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2	2	2					
16	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4	2	2					
17	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1	1	1					

18	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)				82	83	84					
19	Nilai SAKIP				65	69	71					
20	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	1	1					
21	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	1	1					
22	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	1	1					
23	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1	1	1					

24	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1	1	1					
25	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1	1	1					
26	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1	1	1					
27	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)				84	88	92					
28	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				888	888	888					
29	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi				1	1	1					

	Pelaksanaan Tugas ASN											
30	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				41,119	41,942	42,780					
31	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				296	296	296					
32	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5	5	5					
33	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10	10	10					
34	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan				20	20	20					

	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											
35	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2	2	2					
36	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Nilai)				80	85	90					
37	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1	1	1					
38	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				75	80	85					
39	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				65	70	75					

40	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				64	68	72					
41	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1	1	1					
42	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				75	80	85					
43	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				75	80	86					
44	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)				77	79	81					
45	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2	2	2					

46	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1	1	1					
47	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1	1	1					
48	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1	1	1					
49	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1	1	1					
50	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	-	-					
51	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)				-	-	-					
52	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan				15	15	15					

	Kantor yang Disediakan											
53	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15	15	15					
54	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30	30	30					
55	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5	5	5					
56	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15	15	15					
57	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15	15	15					
58	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	-	45					

59	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				3	3	3					
60	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2	2	2					
61	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12	12	12					
62	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	3	5					
63	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)				80	82	84					
64	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	-	6					
65	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3	3	3					

66	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2	-	-					
67	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	1	-					
68	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)				85	86	89					
69	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36	36	36					
70	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	3	3					
71	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)				85	86	89					

72	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	-	-					
73	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3	3	3					
74	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				-	0	0					
75	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				-	-	-					
76	Jumlah Mebel yang Dipelihara				-	2	2					
77	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3	3	3					

78	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				-	-	-					
79	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				-	-	-					
80	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	-	-					
81	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2	2					
82	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2	2					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

Permasalahan pada Rancangan Awal RKPD pada badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kota Balikpapan terkait Urusan Pemerintahan Bidang keuangan, yaitu :

No.	Urusan	Permasalahan	Solusi
1	Keuangan	Belum optimalnya Pembayaran Retribusi Non Tunai	Penguatan Aplikasi Pembayaran Non Tunai (Retribusi)
		Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Mengoptimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 2. Permasalahan RKPD BPPDRD

Berdasarkan Peraturan Wali Nomor 43 Tahun 2016 Kota Balikpapan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPDRD merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BPPDRD memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;

5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
7. Pelaksanaan sosialisasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, BPPDRD Kota Balikpapan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung pada Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. Pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi Subbidang yang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;
- d. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;

- e. Pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
- f. Pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
- g. Pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
- h. Pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
- j. Pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
- k. Pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
- l. Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
- m. Pengendalian pelaksanaan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
- o. Pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
- p. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang terutang serta penatausahaan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- d. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- e. Pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;
- f. Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- g. Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
- h. Pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;
- i. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- j. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan;
- b. Perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- e. Pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. Pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
- i. Pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- j. Pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- k. Pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
- m. Penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- o. Pengendalian penyelenggaraan pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
- p. Pelaksanaan inventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- h. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- i. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- j. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. Pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- p. Pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Merujuk pada tugas dan fungsi BPPDRD Kota Balikpapan, terdapat beberapa isu- isu Penting, antara lain :

- 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau peningkatan kualitas aparatur daerah bidang perpajakan adalah mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak yang aspiratif, transparan dan akuntabel
- 2. Menggali sumber sumber pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan peningkatan akurasi data potensi penerimaan pajak
- 3. Pertumbuhan ekonomi kreatif kota adalah menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja, magnet bagi wisatawan, mampu menumbuhkan potensi ekonominya dan menampung gerakan ekonomi baru bagi warganya. Kota menjadi rumah bagi bisnis, organisasi, dan individu kreatif, karakter lokal, dan kerarifan lokal merupakan kekuatan kreatif warga dan kota
- 4. Optimalisasi peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD

5. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas
6. Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

- a. Perlunya penyesuaian dan orientasi tugas pokok dan fungsi yang baru terhadap Pejabat Struktural dan staf, dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah baru,
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki;
- c. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Kurangnya keterlibatan Masyarakat dalam memberikan informasi potensi Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun Peluang Badan Pengelola Pajak daerah dan retribusi Daerah adalah Sebagai berikut :

- a. Dasar hukum yang kuat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak/ Retribusi Daerah;
- b. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- d. Dukungan dari salah satu BUMN dan BUMD bidang perbankan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra OPD dan tingkat kinerja oleh OPD, sesuai arahan kepala Daerah sesuai prioritas program /kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review rancangan awal RKPD BPPDRD Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah seperti table 2.4 berikut ini :

Tabel. 2.4

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Balikpapan	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1.321,97	17.003.245.625	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Balikpapan	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1.321,97	12.108.945.161	
2	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Balikpapan	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	1.321,97	17.003.245.625	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Balikpapan	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	17.08	12.108.945.161	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	86	37.466.347.371	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	86	58.317.376.207	
4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75	75.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75	149.594.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	100	30.451.278.645	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	83	52.928.676.124	
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	85	490.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	85	300.000.000	
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	88	3.245.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	88	2.345.254.183	
9	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	88	268.068.726	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	88	750.000.000	
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	96	1.450.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikipapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	83	961.189.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	95	1.152.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	83	374.840.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai OPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada wajib pajak, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.5
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan ***)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Program dan kegiatan Pelayanan Terhadap Wajib Pajak yang terkait dengan Kebutuhan Wajib Pajak dan untuk pencapaian target PAD Kota Balikpapan tidak diusulkan melalui Proses Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai kepada Forum OPD yang dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Kota Balikpapan.

BAB III

**TUJUAN, DAN SASARAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan IK (Indikator Kinerja) di lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Misi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur dan Kementrian Keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

Telaahan Misi Kementrian Keuangan, dan Badan Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Misi Kementrian Keuangan Republik Indonesia	Misi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan
Menarik dan mempertahankan Talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai	Meningkatkan Profesionalisme aparatur
	Meningkatkan Kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain	Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mencapai tingkat kepatuhan Pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat	Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat
	Meningkatkan Kontribusi yang optimal bagi APBD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN

3.2.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kota, yaitu :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah;

3.2.2. SASARAN

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan lebih spesifik.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah :

- 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
dengan indikator sasaran :
Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;**
dengan indikator sasaran :
Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 3.2 :Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retibusi Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -					Kondisi akhir Capaian Tujuan /Sasaran
					2023	2025	2025	2025	2026	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel bidang pendapatan daerah	Meningkatn ya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Indikator Tujuan: Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	24,21	36,88	41.42	44.17	44.74	44.40	44.40
			Indikator Sasaran: Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	17.99	26.40	35.57	60.17	72.41	83.31	83.31

Program Dan Kegiatan Usulan Tahun 20256

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Balikpapan	1.321,97	17.003.245.625	APBD		1.321,97	12.021.981.602
5	2	4	2	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	Balikpapan	14.07	17.003.245.625	APBD		14.07	12.021.981.602
5	2	4	20 1	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	2.000.000.000	APBD		1	900.000.000
5	2	4	20 1	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengmbangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	1.000.000.000	APBD		1	1.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	201	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	8	750.000.000	APBD		8	750.000.000
5	2	4	201	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	Balikpapan	1	1.500.000.000	APBD		1	1.700.000.000
5	2	4	201	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	1	1.400.000.000	APBD		1	400.000.000
5	2	4	201	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	Balikpapan	1	2.200.000.000	APBD		1	2.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	201	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	Balikpapan	13.000	1.800.000.000	APBD		1	1.800.000.000
5	2	4	201	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	750.000.000	APBD		1	150.000.000
5	2	4	201	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	Balikpapan	11	700.000.000	APBD		1	700.000.000
5	2	4	201	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	Balikpapan	10.150	600.000.000	APBD		1	350.000.000
5	2	4	201	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	850.000.000	APBD		1	400.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	2	4	20 1	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	1	800.000.000	APBD		1	100.000.000
5	2	4	20 1	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	Balikpapan	2	600.000.000	APBD		2	350.000.000
5	2	4	20 1	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Balikpapan	2	2.053.246.625	APBD		2	500.000.000 N
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	85	58.667.376.207	APBD		85	100.984.171.962

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	02	01	2		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	73	149.594.000	APBD		73	170.000.000
	02	01	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	1	99.594.000	APBD		1	110.000.000
	02	01	201	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	1	50.000.000	APBD		1	60.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	01	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	100	53.028.676.124	APBD		100	57.051.601.862
02	01	20 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Balikpapan	100	53.028.676.124	APBD		100	57.051.601.862
02	01	2	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	85	300.000.000	APBD		85	300.000.000
02	01	20 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Balikpapan	50	300.000.000	APBD		50	300.000.000
02	01	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	Balikpapan	88	2.345.254.183	APBD		88	2.365.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	01	206	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	14	616.421.383	APBD		133	550.000.000
02	01	206	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	2	553.911.800	APBD		2	500.000.000
02	01	206	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Balikpapan	1	475.000.000	APBD		1	480.000.000
02	01	206	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Balikpapan	2	99.921.000	APBD		2	100,000,000.00
5	02	01	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Balikpapan	1	500.000.000	APBD		1	500.000.000
5	02	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Balikpapan	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	01	2	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)	Balikpapan	96	1.339.460.000	APBD		96	1.150.000.000
02	01	20 8	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Balikpapan	10	1.339.460.000	APBD		10	850.000.000
02	01	2	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Balikpapan	95	371.729.700	APBD		95	1.150.000.000
02	01	20 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Balikpapan	1	174.978.200	APBD		1	185.000.000
02	01	20 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Balikpapan	1	196.751.500	APBD		1	197.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	01	2	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Balikpapan	93	1.082.662.200	APBD		93	1.180.000.000
02	01	20 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Balikpapan	84	757.822.200	APBD		70	800.000.000
02	01	20 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Balikpapan	220	324.840.000	APBD		220	380.000.000

3.4 Mapping Program dan Kegiatan terhadap Isu Pembangunan

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2025	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	1.321,97	12.021.981.602						
5	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	14.07	12.021.981.602	√					
5	02	04	201	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	900.000.000	√					
5	02	04	201	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1.000.000.000	√					

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2025	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguan	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	04	201	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	8	750.000.000					√	
5	02	04	201	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	1.700.000.000					√	
5	02	04	201	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	400.000.000	√					
5	02	04	201	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	2.000.000.000					√	

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2025	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguran	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	02	04	201	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	1	1.800.000.000	√					
5	02	04	201	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1	150.000.000	√					
5	02	04	201	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	1	700.000.000					√	
5	02	04	201	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	350.000.000	√					
5	02	04	201	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	1	400.000.000	√					

KODE					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target Renja 2025	Pagu Renja (Rp)	Tagging					
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SDGs	Kemiskinan	Pengangguan	Perubahan Iklim	Smart City	Ekonomi Kreatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Daerah (Dokumen)								
5	02	04	201	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	100.000.000	√					
5	02	04	201	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2	350.000.000	√					
5	02	04	201	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2	500.000.000	√					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN

4.1 RENCANA KERJA

Pada Tahun 2025 Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan memiliki 2 Program dan 8 Kegiatan serta 30 Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dan Kebutuhan dana/Pagu Indikatif sebesar Rp. 74.390.735.000,-, sebagaimana table berikut ini :

Program dan Kegiatan yang telah diuraikan di atas sebagai bagian dari upaya BPPDRD dalam rangka pencapaian target. Renstra Organisasi Perangkat Daerah BPPDRD Kota Balikpapan disesuaikan dengan target capaian kinerja serta kebutuhan pagu dana pada Tahun 2025. Harapan yang ingin dicapai adalah agar segenap Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dan berdaya guna sesuai dengan target yang terus direncanakan dan ujungnya adalah pada peningkatan pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan.

..

Tabel Rencana Kerja BPPDRD Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH						74,390,735,000.00							69,526,321,368.00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						74,390,735,000.00							69,526,321,368.00	
	5.02	KEUANGAN						74,390,735,000.00							69,526,321,368.00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	-			85.20 Nilai	64,647,979,550.00						-	58,617,376,207.00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			1 Berita Acara 1 Laporan	149,594,000.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	149,594,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	99,594,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		99,594,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	50,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		50,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			110 Orang/bulan	59,889,497,130.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		52,928,676,124.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/bulan	59,889,497,130.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		52,928,676,124.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-			40 Orang	300,000,000.00			-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		300,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	300,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Memban gun Infratraktur Konektivita s 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		300,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 7 Paket 1 Paket 7 Paket	2,330,075,870.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	2,345,254,183.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	601,243,070.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		616,421,383.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	553,911,800.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		553,911,800.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	475,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		475,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	99,921,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		99,921,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	500,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		500,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		100,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	-			17 Unit	449,650,000.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	800,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				17 Unit	449,650,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		800,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	-			1 Laporan 1 Laporan	299,257,600.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	961,189,700.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	251,165,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		174,978,200.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	48,092,600.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		786,211,500.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	-			1 Laporan 1 Laporan	1,229,904,950.00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	1,132,662,200.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				84 Unit	890,534,950.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		757,822,200.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				220 Unit	339,370,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		374,840,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-			1405 Milyar	9,742,755,450.00						-	10,908,945,161.00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 8 Laporan 11 Layanan 13000 Obyek Pajak 1 Uni	9,742,755,450.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah	-	10,908,945,161.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	756,872,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		782,872,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	475,800,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		249,800,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	987,643,213.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		987,643,213.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1,405,078,704.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		605,083,200.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	400,875,635.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		400,875,635.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				1 Laporan	2,001,381,780.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		2,001,381,780.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>				13000 Obyek Pajak	1,560,519,785.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		3,878,705,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	249,987,200.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		249,987,200.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>				11 Layanan	280,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		228,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>				1 Dokumen	303,252,400.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		303,252,400.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											.					
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	464,951,833.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		364,951,833.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	100,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		100,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	300,000,000.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		300,000,000.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				1 Laporan	456,392,900.00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik 5. Kota nyaman untuk semua	Masyarakat dan Perangkat Daerah		456,392,900.00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB V

INOVASI

Adapun inovasi yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Antara lain :

No.	Nama Inovasi	Fungsi
1.	Sipawlin	Pendaftaran Wajib Pajak Online
2.	e-sptpd	Pelaporan Pajak Online
3.	Portal Payment	Digitalisasi Pembayaran Pajak (non-Tunai)
4.	Display Pajak	Digitalisasi Pelayanan Pajak
5.	Satgas Monalisa	Satuan Tugas Monitoring Alat Perekam Transaksi

BAB V

P E N U T U P

Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responded oleh semua stake holdersnya. Perumusan perencanaan strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni top-down dan bottom-up approach.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang ada.

Rencana Kerja yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi. Rencana Kerja adalah salah satu bagian terpenting dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP). Perjanjian Kinerja merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Rencana Kerja memberikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam satu tahun anggaran tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.